

PERANAN PELAUT DALAM REPRODUKSI WAWASAN KESATUAN GEO-BIO-SOSIAL-BUDAYA MARITIM NUSANTARA: BELAJAR DARI NELAYAN PENGEMBARA BUGIS-MAKASSAR DI SULAWESI SELATAN

THE ROLE OF FISHERMEN IN THE REPRODUCTION OF NUSANTARA GEO-BIO-SOCIO-CULTURE UNITY INSIGHTS: LESSON LEARNS FROM BUGINESE-MAKASSARESE VOYAGE FISHERMEN IN SOUTH SULAWESI

Munsi Lampe

Dosen Tetap pada Departemen Antropologi Fisip Universitas Hasanuddin, Makassar
munsilampe257@gmail.com

Abstract

Literatures mostly focus on the Indonesian maritime communities discussing the local-traditional institutions, socio-economics, fishing techniques, marine fishery modernization which stressing capitalism and global market, poverty of fishing communities, as well as marine ecosystem destruction. In fact, most of those studies neglect the navigation and maritime interaction of fishermen, which become the key to comprehend the core and characteristics of maritime culture over the world. This article aims to identify and analyze the maritime geo-bio-socio-cultural insights of the Buginese-Makassarese fishermen within the context of their voyage and interaction with the other fishermen communities in Indonesia. The data were collected selectively from some research reports, especially "Studying the Institution and Maritime Cultural Concept of Buginese-Makassarese, Mandarese, and Butonese Seamans Supporting the Strength of National Integration and Social Harmony" (LP2M Unhas, 2010), in which I participated as coordinator and team member. From the new "navigation and reproduction of maritime geo-socio-cultural insights" model, four themes of maritime geo-bio-socio-cultural insights of the Buginese-Makassarese can be identified, namely (1) the insight of geo-bio-climate Nusantara sea, (2) the insight of sea as space with its bio-abiotic resources as opened-closed property/access, (3) the insight of maritime ethnic and culture diversity, and (4) the concept of homeland and maritime nation unity.

Keywords: Bugis-Makassar fishermen, reproduction of Nusantara geo-bio-socio-cultural maritime insights, Indonesia

Abstrak

Bacaan tentang masyarakat maritim di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan pilihan subjek pada komunitas-komunitas nelayan dengan fokus studi pada aspek-aspek institusi, sosial-ekonomi, teknologi penangkapan ikan, dan modernisasi teknologi perikanan laut (dengan kapitalisme dan pasar global) serta dampak kemiskinan penduduk nelayan dan kerusakan lingkungan. Sayangnya, kajian yang ada cenderung mengabaikan aspek-aspek kepelayaran dan interaksi kemaritimannya yang justru merupakan kunci menemukan inti dan karakteristik umum budaya maritim di dunia. Tulisan ini bermaksud mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur wawasan kesatuan geo-bio-sosial-budaya maritim ke-Nusantara-an dari nelayan pengembara Bugis-Makassar dalam konteks pelayaran dan interaksi kemaritimannya dengan lingkungan laut dan kelompok nelayan lainnya di Indonesia. Sumber data untuk penulisan artikel ini diambil secara selektif dari beberapa laporan penelitian, khususnya "Studying the Institution and Maritime Cultural Concept of Buginese-Makassarese, Mandarese, and Butonese Seamans Supporting the Strength of National Integration and Social Harmony" (LPPM Unhas, 2010) di mana penulis terlibat aktif sebagai koordinator maupun anggota tim peneliti. Melalui aplikasi model analisis "navigasi dan reproduksi wawasan geo-bio-sosial-budaya maritim" yang baru, empat tema wawasan budaya maritim ke-Nusantara-an yang dimiliki nelayan pengembara Bugis-Makassar dapat diidentifikasi, yaitu (1) wawasan tentang lingkungan geo-bio-iklim perairan Nusantara, (2) wawasan tentang laut dan isinya sebagai ruang terbuka-tertutup, (3) wawasan tentang keanekaragaman suku bangsa laut dan budaya maritimnya, dan (4) konsep kesatuan Tanah Air dan Bangsa Maritim Nusantara.

Kata kunci: kepelautan nelayan pengembara Bugis-Makassar, reproduksi wawasan kesatuan geo-bio-sosial-budaya maritim Nusantara, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi alam dan kemaritiman yang tidak ternilai (geo-bio, sosial-ekonomi, sosial-politik, dan sosial-budaya). Indonesia memiliki potensi geografi, berupa 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai 81.000 Km; luas wilayah darat dan laut yang berturut-turut mencapai 2.027.087 Km² dan 5.800.000 Km². Luas wilayah laut tersebut terdiri dari 3.166.163 Km² perairan nusantara dan teritorial serta 2.500.000 Km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (sebelum Timor Timur lepas dari NKRI). Perairan tersebut mengandung sumber daya hayati alam yang terbarukan (seperti ikan dan biotik lainnya, terumbu karang, padang lamun, dan mangrof) maupun yang tidak terbarukan (seperti minyak dan gas (migas), mineral, besi, dan harta karun) yang melimpah. Selain itu, posisi Kepulauan Indonesia diapit oleh Benua Asia dan Australia serta berada di antara Samudera Hindia dan Pasifik.

Melihat prospek potensi alam dan kemaritiman serta posisi silang dunia yang strategis tersebut, di penghujung masa Orde Baru para intelektual dan pakar pembangunan Indonesia mencetuskan konsep-konsep besar dan cerdas, seperti Benua Maritim Indonesia (BMI) dan Pembangunan Benua Maritim Indonesia (PBMI)¹ (BPPT Teknologi-WANHANKAMNAS, 1996). Di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo juga muncul visi pembangunan nasional “mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia” (Satria, 2014).

Potensi sosial-demografi dan ekonomi berupa penduduk desa-desa dan kota-kota pantai dan pulau-pulau kecil dengan latar etnis berbeda-beda terbentang dari Sabang sampai

¹Dalam konsepsi Benua Maritim Indonesia, Pembangunan Maritim Nasional merupakan subsistem dalam Benua Maritim Indonesia, sebagai perwujudan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yaitu upaya memanfaatkan kekayaan sumber alam dan sumber daya manusia, modal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur maritim Nasional terdiri dari perikanan, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, tenaga kerja laut, pendidikan maritim, masyarakat bahari dan desa pantai, hukum dan tata kelautan, penerangan bahari, survei dan pemetaan serta iptek kelautan, sumber daya laut serta lingkungan hidup pesisir dan pantai.

Merauke yang ditaksir jumlahnya tidak kurang dari 45% dari total penduduk Indonesia. Mereka hidup secara langsung atau tidak langsung dari berbagai sektor ekonomi kelautan, terutama perikanan, transportasi, perdagangan, industri perahu/ kapal kayu, pariwisata bahari, dan sektor jasa lainnya. Perikanan tangkap, pelayaran, dan perdagangan merupakan sektor ekonomi maritim paling tua dan banyak melibatkan penduduk pesisir dan pulau-pulau sejak dahulu.

Nusantara sarat dengan sejarah peradaban maritim dominan yang mencakup aspek-aspek politik pemerintahan, pertahanan keamanan, industri dan arsitektur kapal kayu, transportasi dan perdagangan laut, pelabuhan, astrologi, dan hukum laut yang pernah berkembang mencirikan kerajaan-kerajaan maritim utama Nusantara, seperti Sriwijaya, Tarumanagara, Majapahit, Banten, Samudra Pasai Aceh, Gowa Makassar, dan kedua kesultanan Buton dan Ternate (Benardie SP, 2003). Adapun tradisi perikanan laut di samping usaha transportasi laut banyak dilakoni oleh komunitas-komunitas nelayan etnis pelaut Bugis-Makassar², Mandar, Bajo, Buton, Madura (Horridge, 1981), dan Jawa (Hage, 1910). Hingga batas-batas tertentu, peradaban dan tradisi maritim dalam keanekaragaman corak budaya etnis masih tetap eksis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga kini.

Segecap potensi kemaritiman yang telah dipaparkan di atas menjadikan Indonesia sebagai sebuah kawasan besar di Asia Tenggara dan Pasifik yang penting bagi pengembangan penelitian ilmu-ilmu kepelautan (*maritime sciences*) yang melibatkan pula ilmu-ilmu sosial dan budaya (terutama antropologi, sejarah, sosiologi, hukum, dan ekonomi) dan kelautan (*marine sciences*) yang melibatkan biologi laut, ekologi laut, perikanan, dan lain-lain. Penelitian dimaksudkan bukan hanya untuk kepentingan keilmuan, melainkan juga manfaat praktisnya ke depan bagi eksistensi dan kemajuan peradaban bangsa maritim di negara kepulauan besar ini. Khusus mengenai antropologi, sejarah, dan sosiologi,

²Dalam artikel ini, Etnis Bugis dan Makassar disatukan menjadi “Bugis-Makassar” saja. Hal demikian dimungkinkan karena kedua etnis tersebut memiliki unsur-unsur kebudayaan maritim yang relatif sama, terutama pada sektor pelayaran dan penangkapan ikan. Dari kedua etnis tersebut tidak ditemukan perbedaan yang berarti, baik pada wujud kognitif maupun praktik dan teknologi kemaritiman.

pertanyaannya ialah sejauh mana kontribusinya bagi pengembangan keilmuan dan kemajuan peradaban serta eksistensi NKRI selama ini? Melihat kegiatan penelitian dan kondisi kepustakaan yang ada mengenai kemaritiman, sejauhnyanya harus diakui belum adanya kontribusi yang berarti, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut tentu saja berkorelasi dengan kontribusi praktisnya.

Di Indonesia, ketiga disiplin ilmu sosial dan humaniora tersebut membagi kelemahan kurang lebih sama. Kajian antropologi pada umumnya masih selalu terfokus pada komunitas-komunitas nelayan--kurang mengenai pelayar (pelaku usaha transportasi dan pedagang)--dengan metode etnografi struktural fungsional yang merepresentasikan keunikan-keunikan sosial-budaya, termasuk kearifan lokal, secara holistik dan tertutup. Kajian tersebut cenderung mengabaikan metode komparatif lintas etnik untuk menghasilkan teori-teori budaya maritim (kecil, menengah, besar). Kajian sosiologi banyak menerapkan tradisi Marxis, strukturalisme konflik, dan relasi patron-klien eksploitatif yang dalam penjelasan maupun analisisnya lebih banyak melihat komunitas-komunitas nelayan dalam kondisi miskin dari berbagai dimensi (pendapatan ekonomi, pendidikan, pemukiman, teknologi, kesehatan, wawasan dunia) sebagai korban modernisasi perikanan dengan spirit kapitalisme dan pasar global. Sementara itu, kajian sejarah cenderung berfokus pada dunia peradaban kemaritiman masa lalu ("tradisi maritim besar" dalam istilah Mukhlis Paeni, 1985)--mencakup bidang-bidang politik pemerintahan dari kerajaan maritim Nusantara, kebijakan dan aktivitas pelayaran, infrastruktur pelabuhan dan pergudangan, benteng pertahanan dan persenjataan, industri kapal dan rute-rute pelayaran, jaringan perdagangan dan komoditas pasar--yang pada akhirnya terkikis pula oleh kekuatan kolonial dan modernisasi dengan spirit kapitalisme dan pasar global. Sebaliknya, perikanan laut ("tradisi maritim kecil")³ yang pelakunya banyak dilukiskan dengan kondisi kemiskinannya kurang mendapatkan perhatian dalam kajian sejarah.

³Mukhlis Paeni menggunakan istilah "tradisi budaya maritim besar" untuk peradaban maritim dominan, dan "tradisi budaya maritim kecil" untuk aktivitas penangkapan ikan di laut oleh kaum nelayan miskin. Kedua istilah tersebut terkandung dalam makalahnya "Memahami Kebudayaan Maritim Bugis-Makassar (1985).

Segegap fakta tentang potensi kekayaan geo-bio-sosial-budaya maritim yang pernah digambarkan seperti, konsepsi PBMI, visi pembangunan "Menjadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia", wawasan nasionalisme pelaut Indonesia menurut asumsi beberapa ahli sejarah maritim, dan tersedianya alternatif pendekatan teoritis dan perangkat konsep atau model analisis dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora (terutama antropologi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah) yang aplikatif semestinya menumbuhkan optimisme bagi para akademisi untuk memainkan peranan penting dalam pengembangan keilmuan dan peradaban maritim Indonesia ke depan. Bagi studi antropologi maritim, salah satu sumbangan berarti yang dapat diberikan ialah identifikasi dan representasi unsur-unsur wawasan kesatuan geo-bio-sosial-budaya maritim pelaut Indonesia yang dijelaskan dan dipahami sebagai reproduksi dari pengalaman kepelautan jangka panjang dan interaksi kemaritiman yang luas dalam batas-batas jagat maritim Nusantara ini.

Artikel ini menggunakan kasus nelayan pengembara Bugis-Makassar dari Sulawesi Selatan dengan data/informasi bersumber dari beberapa laporan penelitian dan publikasi berciri etnografi di mana penulis terlibat sebagai koordinator dan anggota peneliti⁴--kajian yang sama terhadap pelayar Bugis-Makassar telah terpublikasi dalam Jurnal Humaniora (Budaya, Sastra, dan Bahasa) UGM, 2012. Adapun pendekatan dan model analisis yang dikembangkan terinspirasi dari perspektif ekosistem (dalam ekologi manusia) dari A.H.J.Prins (antropolog maritim) yang mau menemukan "*maritime ethos disposition/ maritime way of life*" sebagai reproduksi dari interaksi

⁴Studi Analisis Sosial dalam Rangka Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) Sulawesi Selatan, periode 1996/1997 dan Periode 1997/1998 (Koordinator), LIPI-LP2M Unhas; Studi Coral Reef Resource Use dalam Rangka Optimasi Zonasi Taman Nasional Takabonerate (Koordinator, 2000); Menggali Kelembagaan dan Wawasan Budaya Maritim Bugis-Makassar dan Buton yang Menunjang bagi Penguatan Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial (Koordinator, 2010), LP2M Unhas; Pemanfaatan Sumberdaya Taka: Perilaku Nelayan dan Konsekuensinya dalam Konteks Sosial Budaya Internal dan Eksternal (Disertasi, 2006), Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta; dan Pinggawa-sawi Nelayan Bugis-Makassar dalam Analisis Relasi Internal dan Eksternal (Koordinator, 2014), LP2M Unhas.

manusia dengan lingkungan laut melalui media pelayaran, perdagangan, dan penangkapan ikan.

Antropologi Maritim, Pendekatan Teoritis, dan Model Analisis: Navigasi and Reproduksi Sikap Etos Maritim⁵

Dari sumber literatur yang melimpah, Nishimura menyimpulkan bahwa *maritime ethnology or anthropology is seem to be ship, sailor's life, navigation. In other word, the main concern is nautical research.* Pada perkembangan berikutnya konsep-konsep tersebut muncul antara lain dalam beberapa publikasi, seperti *Source Book of Maritime Anthropology* dari Prins dan Adrianga (dalam Nishimura, 1973), *Sailing From Lamu: A Study of Maritime Culture* (Prins, 1965), *Watching the Seaside: Essay on Maritime Anthropology* (Prins, 1984), dan sebuah pengantar Editorial Jurnal Internasional *Maritime Anthropological Studies (MAS) Special Issues in Maritime Anthropology* (Poggie & Polnac, 1988).

Untuk pengembangan studi kebudayaan nelayan pada aspek-aspek pelayaran dan interaksi kemaritiman, pendekatan ekologi dan model analisis dari Prins cukup relevan dijadikan sebagai sumber inspirasi. Dengan pendekatan ekosistem, Prins (1965, 1984) melihat interaksi manusia dengan lingkungan lautnya--subjek risetnya ialah Orang Lamu (sebuah kelompok etnik pelaut di Kenya Afrika yang menghuni daerah pantai utara)--melalui media berupa perkapalan, pelayaran, perdagangan, penangkapan ikan sebagai pintu masuk mengenali kebudayaan maritim lokal (*maritime local culture*). Melalui pendekatan ekosistem, Prins (dalam bab pendahuluan buku *Watching the Seaside: Essay on Maritime Anthropology* oleh Hak dan Ybeltje Krues hlm. 2) merumuskan tujuan studinya sebagai berikut:

"It has been my purpose to intimate how Lamu people look at each other and handle their environment. A single section, the relation between people and the sea: shipping, trade, and fishing are chosen as the elements of customs through which we are led to understand the local culture, a maritime culture".

Dapat dipahami bahwa Prins dengan pandangan pertama melihat kebudayaan pada

⁵Bahasa Inggrisnya "navigation and reproduction of maritime ethos disposition"

perangkat kerasnya. Kemudian melacak lebih lanjut pada inti budaya (*cultural core*) dengan mempertanyakan: apanya kebudayaan maritim itu disebut sebagai kemaritiman (*maritimness*) dan bagaimana itu terbentuk? Dengan aplikasi konsep orientasi budaya (*cultural orientation*) dari R. Linton, Prins lantas sampai pada temuan inti kebudayaan yang disebut *maritime ethos disposition* yang merupakan perangkat cara hidup kemaritiman (*maritimness way of life*). Adapun proses terbentuknya sikap etos maritim menurut Prins (dalam pendahuluan oleh Hak dan Ybeltje Krues, hlm. 2-4) pada pokoknya seperti berikut:

"...a culture with a kind of incipient ethos constellation, brought in to contact with the sea, will take to it and produce a maritimness way of life; ...and that a seafaring life produces a maritime ethos disposition...In a maritime cultural pragmatism, instrumentalism and adaptivity are the main components of the ethos system. Logical correlations are...non-conformism, non-normativism, erraticism and blur, adaptivity, disharmony and looseness of structure. Adding to this are... indifference/egalitarianism, lightheadedness in normative matters, leniency; and finally... unmeasuredness, abruptness or discontinuity, opposition or competitiveness, risk and swagger".

Patut diakui bahwa pendekatan dari Prins di atas telah menyajikan sebuah model analisis/penjelasan berkadar ilmiah tinggi. Di sini *maritime ethos disposition (cultural core)* dijelaskan sebagai reproduksi dari pengalaman panjang dalam dunia pelayaran, perdagangan atau penangkapan ikan yang merupakan media interaksi antarpelaut dan dengan lingkungan lautnya.

Dari mencermati beberapa item dari *maritime ethos disposition* tersebut, dinilai bahwa model analisisnya mengandung sejumlah kelemahan terutama sifat abstrak atau kurang empirik. Pertama, sulit membuktikan secara empirik bahwa item-item *maritime ethos disposition* betul-betul merupakan reproduksi dari pengalaman pelayaran jangka panjang. Bagi pelaut Bugis-Makassar misalnya, unsur-unsur kepribadian seperti jujur dan terpercaya, berperilaku baik, berani dan senang berpetualang, kepemimpinan yang baik (Dick-Read, 2005: 88-105), mentaati janji, suka menawarkan bantuan, memberi hadiah, dan sebagainya (Poellinggomang, 2002) jelas sulit dibuktikan sebagai reproduksi

pengalaman pelayaran sebab boleh jadi kebanyakan item di antaranya justru bagian dari nilai-nilai budaya yang terinternalisasi lebih awal dalam lingkungan masyarakat Bugis-Makassar luas di darat. Kedua, keliru menggeneralisasi prinsip atau sifat seperti *egalitarianism, indifference or looseness of the structure* sebagai karakteristik pelaut ulung pada umumnya. Hal ini terbuktikan dengan banyaknya perusahaan pelayaran skala besar dan modern dicirikan dengan struktur organisasi kompleks dengan pembagian status dan peran serta perbedaan bagian hasil atau upah yang tajam (Seperti disampaikan Hak & Ybeltje Krues dalam Prins, 1984: 4). Sama halnya dengan konsep-konsep, seperti *nonconformism, nonnormativism, erraticism and blur, disharmony and looseness of structure, unmeasuredness, ubrupness or discontinuity, risk and swagger* belum tentu ditemukan pada kelompok-kelompok pelaut beragama Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu yang cukup fanatik. Ketiga, dari pandangan etika penelitian, banyak unsur dalam sikap etos maritim yang tidak boleh diperbincangkan secara leluasa, terutama dengan pemilik kebudayaan, karena mengandung nilai-nilai negatif bagi mereka.

Konsep-konsep dari *maritime ethos disposition* yang abstrak ini dapat dibandingkan dengan konsep etos yang rasional dari Max Weber seperti berpikir rasional, berdisiplin tinggi, bekerja tekun, sistematis, berorientasi sukses, hemat bersahaja dan suka menabung dan berinvestasi yang menjadi titik tolak berkembangnya kapitalisme di dunia modern. Daripada terjebak dalam analisis yang abstrak, lebih baik memilih arah/fokus baru dengan model analisis kepelautan dan reproduksi wawasan geo-bio-sosial-budaya maritim (*seamanship and reproduction of maritime geo-bio-socio-cultural insights*) yang mengkombinasikan analisis diakronis dan sinkronis secara empirik.

Nasionalisme Pelaut: Asumsi Seorang LSM dan Sejarawan Maritim Indonesia

Pada suatu pagi hari di tahun 1997 dalam Ruang Pola Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, saya diajak berbincang oleh seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang cukup dikenal, Linda Christianty namanya. Perbincangan singkat kami berlangsung pada saat break dari seminar hasil penelitian “Analisis Sosial dalam Rangka COREMAP (*Coral Reef*

Rehabilitation and Management Programme) Provinsi Sulawesi Selatan periode 1996/1997 di mana saya menjadi koordinator proyek penelitian. Linda Christianty terlibat sebagai konsultan implementasi Program COREMAP tersebut. Dia mengungkapkan bahwa para pelautlah, terutama pelaut Bugis-Makassar yang memiliki keberanian berpetualang di perairan Nusantara sejak dahulu hingga sekarang, bahkan merekalah di antara warga negara yang memiliki wawasan kesatuan Nusantara dan nasionalisme yang tinggi (Lampe, 2012: 122).

Sama halnya Edward Poelinggomang, seorang sejarawan maritim Bugis-Makassar (2002), berpendapat bahwa gagasan tentang kesatuan bangsa lahir dari jaringan pelayaran yang meluas dan intensif di masa lalu. Menurutnya, pembentukan Kepulauan Nusantara ini menjadi satu bangsa diterima karena telah terjalin persahabatan dan persaudaraan yang terbentuk melalui jaringan pelayaran dan perdagangan maritim yang membuahkan sikap toleransi dan simpati antarkelompok kaum. Salah satu kelompok etnis di Nusantara ini yang memiliki andil yang cukup berarti itu, menurutnya, adalah pelaut dan pedagang Bugis-Makassar dari Sulawesi Selatan. Peranan pelaut sebagai perekat bangsa-bangsa dan penyebar peradaban termasuk budaya berpakaian di Nusantara ini di masa kejayaan kerajaan-kerajaan Tarumanagara, Sriwijaya, dan lainnya juga diungkapkan oleh sejarawan Benardie (2003: 370).

Asumsinya bahwa spirit budaya maritim dan wawasan kesatuan tanah air-bangsa-bahasa (*nationalism*), bahkan wawasan dunia dengan sikap keterbukaan dari pelaut Bugis-Makassar (sebagai pelayar dan nelayan pengembara) adalah reproduksi dari pengalaman pelayaran jangka panjang dan interaksi kemaritiman yang luas selama ini. Diasumsikan pula bahwa masyarakat maritim/pelaut Indonesia terutama kelompok-kelompok nelayan pengembara dan pelayar yang dengan pengalaman pelayaran yang panjang dan interaksi kemaritiman lintas etnik yang luas juga memiliki potensi dan berperan menumbuhkan wawasan kesatuan geo-bio-sosial-budaya maritim Nusantara, meskipun dengan kadar berbeda-beda. Wawasan budaya maritim tersebut pada gilirannya berperan menjaga integrasi bangsa dan harmonisasi sosial dari generasi ke generasi.

Peranan Pelaut Bugis-Makassar dalam Reproduksi Wawasan Geo-Bio-Sosial-Budaya Maritim Nusantara/Indonesia

Kurangnya studi etnografi nelayan tentang aspek kepelayaran dan fenomena kompleksitas karakteristik geo-bio-sosial-budaya maritim Indonesia seperti dideskripsikan sebelumnya masing-masing menjadi faktor pendorong dan penarik untuk mengarahkan fokus studi pada aspek pelayaran dan interaksi kemaritiman. Adapun pendekatan dengan model analisis *seafaring life produces a "maritime ethos disposition"* dari Prins menjadi sumber inspirasi cukup berarti bagi pengembangan sebuah model analisis alternatif, yakni kepelautan dan reproduksi wawasan geo-bio-sosial-budaya maritim (*seamanship and reproduction of maritime geo-bio-socio-cultural insights*) dalam rangka mengenali karakteristik ke-Nusantara-an dari budaya maritim masyarakat nelayan pengembara Bugis-Makassar khususnya, dan karakteristik umum (*commonality*) masyarakat nelayan dari negara-negara kepulauan besar di dunia pada umumnya.

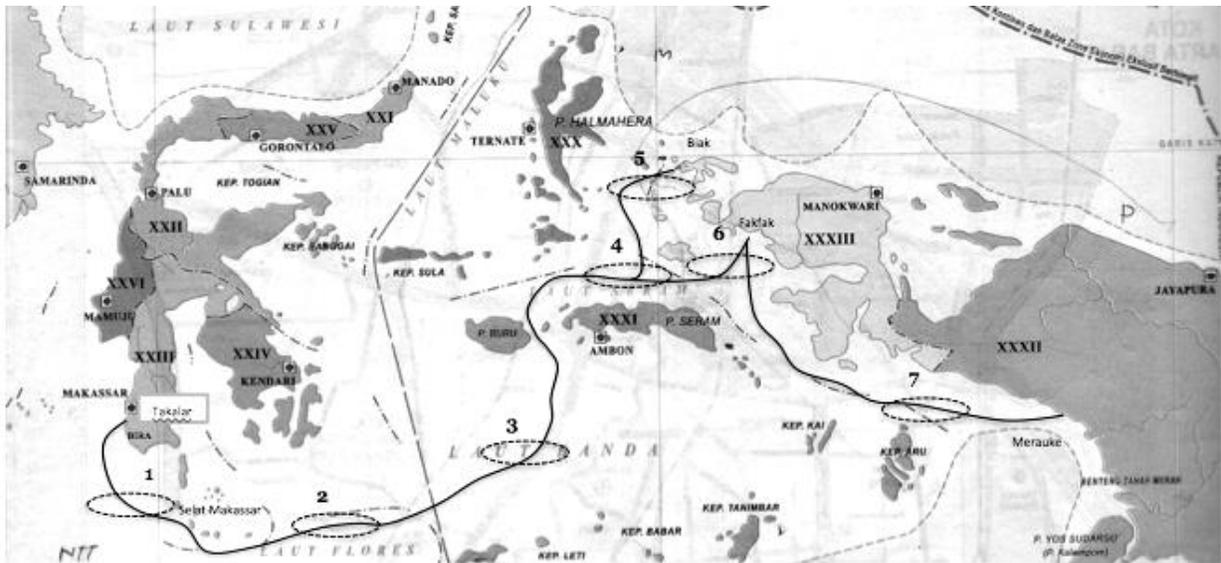
Dalam konteks negara kepulauan Indonesia, konsep kesatuan wawasan geo-bio-sosial-budaya maritim mengandung konsepsi dan gambaran tentang karakteristik geografi bentang laut dan gugusan pulau-pulau, perairan dan sumber daya laut (*biotic, abiotic*), pola musim dan kondisi iklim, status pemanfaatan ruang dan sumber daya laut (*opened-closed access*), keanekaragaman etnis dan budaya pelaut (*ethnic group and cultural diversity*) hingga wawasan kesatuan tanah air dan bangsa pelaut yang dipahami sebagai reproduksi dari pengalaman pelayaran dan interaksi kemaritiman pelaut sejak dahulu. Berikut ini ialah penjelasan dan gambaran dari empat tema pokok wawasan geo-bio-sosial-budaya maritim dari nelayan pengembara Bugis-Makassar dalam konteks ke-Nusantara-an. Mendahului ini disajikan gambaran tentang rute-rute pelayaran dan daerah penangkapan ikan dari nelayan pengembara Bugis-Makassar di perairan Nusantara.

Melacak Rute Pelayaran dan Daerah Penangkapan Ikan Nelayan Pengembara Bugis-Makassar

Nelayan dan pelayar Bugis-Makassar dari Sulawesi Selatan sejak dahulu dikenal meluas di Nusantara sebagai pelaut ulung yang berani mengembara jauh ke perairan kawasan

timur, selatan, dan barat Indonesia selama berbulan-bulan kemudian kembali lagi ke negerinya tersebut. Kepandaian membuat perahu dan sikap keberanian berlayar telah menjadi etos kemaritiman pelaut Bugis-Makassar di samping pelaut-pelaut Mandar (Sulawesi Barat), Bajo (kebanyakan berasosiasi dengan masyarakat maritim Bugis-Makassar), Buton, Madura (Horridge, 1981), dan Jawa (Hage, 1910). Pelaut Bugis-Makassar, khususnya nelayan, pada umumnya berasal dari desa-desa pesisir pantai Sulawesi Selatan dan pulau-pulau di sekitarnya terbentang dari Luwuk, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba di bagian timur (berhadapan dengan Teluk Bone), dan Bantaeng, Jennepono, Takalar, Gowa, Kota Makassar, Maros, Pangkep (Pangkajene Kepulauan), Barru, hingga Kota Parepare dan Pinrang di bagian barat pulau (berhadapan Selat Makassar).

Di antara semua penduduk desa-desa nelayan pesisir dan pulau-pulau tersebut, nelayan Bajoe (Bone), Pulau Sembilan, Lappa, Babana (Sinjai), Galesong (Takalar), dan ketiga pulau Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Kodingareng (Kota Makassar) yang dikenal sebagai pelaut pengembara jarak jauh yang berani hingga sekarang. Mereka ini masing-masing cenderung terspesialisasi pada penangkapan jenis-jenis ikan dan biota laut tertentu. Demikianlah dikenal tiga kategori nelayan pengembara yang hebat yakni (1) nelayan penyelam dari Pulau Sembilan, Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Kodingareng yang mencari teripang dan kerang (terutama siput mutiara); (2) nelayan pancing tongkol (termasuk ikan cakalang dan tuna) dari Bajoe, Lappa, dan Babana; dan (3) nelayan torani dari Galesong yang menangkap ikan terbang dan mengumpulkan telurnya. Mengenai rute-rute pelayaran lintas perairan provinsi dan daerah penangkapan ikan dari masing-masing kategori nelayan pengembara Bugis-Makassar dari Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam gambar peta 1, 2, dan 3 berikut.



Gambar 1

Nelayan ikan terbang dan pencari telur ikan dari Galesong (Kab. Takalar) sejak beberapa dasawarsa memperluas wilayah penangkapan dari Selat Makassar ke Laut Flores, Laut Banda, terus ke perairan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, hingga perairan-perairan Biak, Fak-Fak, dan Mrauke (Irian) (Lampe dkk., 2014).



Gambar 2

Nelayan pancing tongkol dari Babana dan Lappa (Kab. Sinjai) mula-mula beroperasi di Teluk Bone (wilayah perairan sendiri), kemudian memperluas wilayah penangkapan ke Laut Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Maluku. Bahkan sejak tahun 1998 kebanyakan nelayan Sinjai tersebut sudah memasuki perairan-perairan Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Pacitan (Jawa Timur) hingga Cilacap (Jawa Tengah) yang ganas arus dan ombaknya untuk menangkap tongkol, cakalang, dan tuna (Lampe, 2006, 2014/2015).



Gambar 3

Kelompok-kelompok nelayan penyelam dari Pulau Sembilan (Kab. Sinjai), Pulau Barranglombo dan Pulau Kodingareng (Kota Makassar) dikenal paling berani mengembara selama berbulan-bulan ke berbagai wilayah perairan karang Nusantara yang kaya dengan jenis-jenis sumber daya perikanan bernilai ekonomi pasar ekspor seperti teripang, kerang-kerangan, dan tumbuhan laut (akar bahar dan rotan laut). Dalam pengembaraan ke Kawasan Timur Indonesia, mereka mendatangi perairan pesisir Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, Biak dan Merauke. Ke arah barat, mereka mendatangi perairan pantai pulau-pulau dalam wilayah Kalimantan Selatan, kemudian menyebrang ke Sumatra untuk menyelam di perairan pantai pulau-pulau Nias, Sibolga, dan Mentawai wilayah Sumatra Utara dan Barat (Lampe dkk, 1996/1997 dan 1997/1998; Lampe, 2006; Lampe, 2009, Lampe dkk, 2014/2015).

Ke arah selatan, kelompok-kelompok nelayan penyelam dari Pulau Sembilan (Kab. Sinjai), Pulau Barranglombo dan Pulau Kodingareng (Kota Makassar) mendatangi perairan Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali. Bahkan awal periode 1990-an, cukup banyak kelompok nelayan penyelam sampai di beberapa lokasi perairan pantai utara dan barat Australia. Menurut cerita nelayan, bilamana kapal-kapal penyelam di Darwin Australia belum penuh dengan tangkapan, sebagian kelompok penyelam menuju ke perairan pantai selatan Papua New Guinea untuk menambah tangkapannya, baru kembali ke Makassar. Mengenai gambaran historis dan etnografi kepelayaran nelayan Bugis-Makassar--banyak melibatkan orang Bajo--ke berbagai *fishing grounds* kawasan timur dan selatan Nusantara hingga pantai utara dan barat Australia antara lain terkandung dalam *The Macassans: A Study of the Early Trepan Industry along the Northern Territory Coast* (Macknight, C.C. 1969), *The Poyage to Marege: Macassan Trepanners in Northern Australia* (Macknight, C.C. 1976), dan paper dari Sutherland "Tripang and Wangkang: The China Trade of Eighteenth Century Makassar" (2000).

Pengalaman pelayaran jarak jauh dan lama serta pemanfaatan kekayaan biodiversitas sumber daya perikanan berasosiasi terumbu karang merupakan praktik dari perangkat-perangkat pengetahuan dan wawasan yang diperoleh nelayan dari generasi terdahulu yang pada gilirannya mereproduksi pengetahuan dan wawasan kemaritiman melampaui batas-batas lokal dan etnis hingga nasional, bahkan global. Fenomena tersebut sekaligus menyatakan kelompok-kelompok nelayan pengembara Bugis-Makassar sebagai komponen ekosistem laut dan sosial-budaya terbuka dan dinamis, bukan tertutup dan statis penuh keseimbangan (homeostasis).

Kepelayaran dan Wawasan Geo-Bio-Climate Perairan Nusantara

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kebanyakan nelayan Bugis-Makassar tergolong kelompok pengembara jarak jauh lintas perairan provinsi di Indonesia ke arah timur dan tenggara, selatan, dan barat. Mereka terdiri dari berbagai kategori menurut jenis-jenis sumber daya perikanan yang dimanfaatkan dan tipe-tipe perahu/kapal dan alat tangkap digunakan. Ada beberapa kelompok nelayan yang dikenal, misalnya kelompok-kelompok

nelayan penyelam (pencari teripang, kerang, dan tumbuhan laut), nelayan pancing tongkol/cakalang dan tuna, dan nelayan *patorani* (penangkap ikan terbang dan pencari telur ikan). Pada umumnya kelompok-kelompok nelayan Bugis-Makassar jarak jauh mulai berangkat ke berbagai arah daerah penangkapan untuk melakukan aktivitasnya di awal musim timur bulan Juli setelah berlangsung musim pancaroba pertama di bulan Mei dan Juni. Mereka kembali lagi ke desanya menjelang tibanya musim barat paling lambat November sebelum berlangsung musim pancaroba kedua di bulan Desember.

Dengan pengalaman yang banyak memungkinkan setiap anggota kelompok-kelompok nelayan mengakumulasi item-item pengetahuan dan membangun wawasan maritim baru melampaui yang diperoleh lewat pewarisan dari nelayan generasi tua. Pengalamanlah menurut nelayan yang selalu menjadi sumber utama bagi pengayaan pengetahuan dan tumbuhnya wawasan maritim dari para pelaut. Pengetahuan yang diwariskan dari generasi tua atau orang lain di desa menurut nelayan, baru terpercaya dan berarti sebagai pedoman bertindak ketika sedang melakukan aktivitas melaut. Akumulasi pengetahuan geo-bio-klimatologi kelautan dari nelayan mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang daerah perairan dan pulau-pulau didatangi, perubahan iklim secara makro (musim barat, timur, pancaroba), variasi pola dan pergantian musim tingkat lokal setiap wilayah perairan, keadaan ombak dan arus di situ, posisi dan jarak daerah penangkapan ikan, dan kondisi sumber daya perikanan yang berbeda-beda yang semuanya terpetakan dalam ingatan semata (*cognitive maps*) dan peta kertas, dan sebagainya. Sebagai contoh, kelompok-kelompok penyelam teripang dan kerang dari Pulau Sembilan, yang beroperasi di kawasan perairan karang Taka Bonerate (Selayar), Maluku Tenggara, Biak, dan lain-lain banyak menceritakan pengalaman beradaptasi dengan dan akumulasi pengetahuan tentang kondisi geo-bio-climate perairan yang didatangi tersebut.

Dari sistem klasifikasi pengetahuan tersebut muncul berbagai wawasan nelayan seperti “pada musim-musim tertentu dan pada lokasi-lokasi tertentu pula banyak atau sedikit ikannya” (nelayan penangkap tongkol dan ikan terbang), “berkurangnya jumlah populasi ikan

pada kebanyakan daerah perikanan akhir-akhir ini disebabkan oleh intensifnya penangkapan dan meningkatnya jumlah penduduk nelayan” (terutama nelayan penyelam yang mengeksploitasi gugusan karang), dan sebagainya.

Akumulasi pengetahuan dan munculnya wawasan maritim baru dimungkinkan dengan kecenderungan umum nelayan selalu mencari dan menemukan daerah penangkapan ikan yang subur dengan berbagai jenis ikan dan biota bernilai ekonomi. Kecenderungan nelayan pengembara tersebut dapat dibandingkan dengan pelayar atau pedagang (*passompe'*) yang suka mendatangi pelabuhan-pelabuhan baru untuk mencari komoditas-komoditas baru lebih laris dan menguntungkan.

Keputusan nelayan melakukan pengembaraan dan menetapkan atau mengganti jenis-jenis tangkapan banyak dipengaruhi oleh kondisi harga atau situasi pasar yang yang berubah-ubah diketahui lewat interaksi dengan sesama nelayan di laut dan pedagang di pelabuhan/TPI yang disinggahi di mana-mana.

Kepelautan dan Wawasan tentang Laut sebagai Wilayah Terbuka dan Tertutup

Kelompok-kelompok nelayan pengembara jarak jauh dari berbagai kelompok etnik di Indonesia pada kenyataannya memiliki pengetahuan dan wawasan tentang status pemanfaatan sumber daya perikanan yang berbeda-beda antara satu wilayah perairan dan wilayah-wilayah perairan lainnya di Nusantara ini. Nelayan Bugis-Makassar dideskripsikan di muka pada mulanya memahami perairan Nusantara dan teritorial (perairan sepanjang pantai) pada umumnya sebagai daerah bebas dimasuki dan dimanfaatkan secara bersama sumber daya dikandungnya (*open/free use*), kecuali sebagian wilayah perairan pesisir dan pantai di kawasan Timur Indonesia (Maluku dan Papua) yang dikuasai secara komunal desa (Petuanan dalam istilah masyarakat Maluku) yang pemanfaatannya dikelola dengan institusi/ pranata adat *Sasi*.

Daerah-daerah penangkapan ikan tongkol, cakalang, dan tuna yang tersebar meluas dalam wilayah perairan NTT, Maluku, NTB, Bali, Pacitan (Jawa Timur) dan Cilacap (Jawa Tengah) pada umumnya merupakan wilayah terbuka bagi para nelayan dari berbagai daerah asal dan etnik.

Daerah penangkapan ikan tersebut pada musim timur selalu menjadi konsentrasi nelayan dari berbagai asal dan etnik, terutama nelayan Bugis-Makassar, Madura, dan Jawa, untuk secara bersama-sama melakukan penangkapan. Sama halnya daerah penangkapan ikan lepas pantai kawasan timur Indonesia juga dieksploitasi secara bersama-sama oleh kelompok-kelompok nelayan tongkol dari Sulawesi Selatan, Buton (Sulawesi Tenggara), NTT, Sulawesi Utara, dan nelayan ikan terbang dari Galsong (Sulawesi Selatan). Pengalaman pelayaran jarak jauh dan interaksi dengan sesama nelayan dari berbagai asal dan etnik telah menumbuhkan dan memperkuat wawasan kemaritiman nelayan tentang laut sebagai lapangan terbuka dengan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bersama.

Hal menarik karena pada lokasi-lokasi konsentrasi penangkapan ikan seperti itu justru jarang sekali terjadi konflik antarkelompok nelayan baik sesama etnis maupun antaretnik. Hal ini, menurut keterangan dari nelayan Bugis-Makassar, dimungkinkan dengan adanya norma adat secara otomatis dipatuhi semua nelayan memasuki lokasi-lokasi tertentu secara antri. Lazimnya menurut norma adat tersebut, kelompok-kelompok nelayan yang sudah banyak tangkapannya memberi kode berupa kibaran kain putih untuk mempersilahkan yang lainnya memasuki lokasi penangkapan yang subur. Fenomena konflik, menurut keterangan nelayan, biasanya ditimbulkan oleh kelompok-kelompok nelayan baru yang belum memiliki norma adat mapan terutama kapal-kapal perikanan modern milik perusahaan kapitalistik yang mengejar keuntungan semata, sebaliknya tidak mengindahkan norma adat yang mengatur praktik pemanfaatan secara adil yang diberlakukan oleh nelayan rakyat.

Pernah ada kasus dialami oleh nelayan penyelam Bugis-Makassar dari Sulawesi Selatan yang di awal-awal pengembaraannya sering ditangkap oleh *Kewang* (penjaga lokasi Sasi) di Maluku dan Papua karena ketidaktahuan mereka tentang adanya pranata adat *Sasi* dan batas-batas antara perairan bebas dengan wilayah adat tersebut. Kasus pelanggaran norma adat tersebut lazimnya diselesaikan dengan pembayaran denda oleh pihak pelanggar. Seorang nakoda kapal penyelam (*Pinggawa Laut*) dari Pulau Sembilan (Kab. Sinjai) yang pernah mengalami kasus

seperti itu menjelaskan bahwa kasus-kasus yang sama jarang sekali terulang pada pelaku yang sama karena belajar dari pengalaman. Untuk tidak sering berbenturan dengan wilayah *Sasi*, menurut Nakoda tersebut, para nelayan selalu mencari daerah penangkapan ikan baru lainnya yang bebas dari klaim adat.

Sejak periode 1980-an ketika berbagai program pengelolaan potensi laut mulai diimplementasi seperti Taman Nasional Laut, daerah perlindungan Laut (DPL) dan semacamnya, kawasan budi daya dan Taman Wisata Bahari milik pemerintah daerah dan perusahaan swasta, kelompok-kelompok nelayan pengembara jarak jauh terutama penyelam teripang dan kerang dari Sulawesi Selatan mulai merasakan keterbatasan ruang eksploitasinya. Mereka banyak kali berbenturan dengan kebijakan larangan pemerintah ketika memasuki kawasan-kawasan lindung di samping wilayah-wilayah perairan pesisir pantai yang dikuasai secara adat di kawasan timur Indonesia. Dalam rangka menanggapi dan beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan pembatasan ruang operasi di laut, nelayan berhadapan dan berinteraksi dengan berbagai kategori *stakeholders* (aparatur pemerintah, satuan tugas (satgas) keamanan laut, marinir, LSM, pihak swasta, komunitas adat, kalangan akademisi), dan masyarakat adat pemilik pranata *Sasi*. Berbagai pengalaman pelayaran jarak jauh, berbenturan dengan kebijakan formal/nasional dan informal/lokal, berinteraksi dengan berbagai pihak *stakeholders* mereproduksi wawasan dan pengakuan nelayan akan adanya berbagai bentuk hak penguasaan wilayah-wilayah perairan tertentu terutama daerah pesisir pantai, pulau-pulau, dan terumbu karang sebagai kawasan tertutup.

Kepelautan dan Wawasan tentang Keberagaman Etnik dan Budaya Maritim

Sebagaimana digambarkan sebelumnya bahwa pelayaran kelompok-kelompok nelayan Bugis-Makassar jarak jauh senantiasa berpindah-pindah untuk menemukan daerah penangkapan ikan baru yang potensial. Karena hampir semua daerah penangkapan ikan yang dikunjungi biasanya sudah terlebih dahulu atau kemudian didatangi pula oleh kelompok-kelompok nelayan lainnya dari daerah asal dan etnik yang berbeda-beda, sehingga bagi mereka pasti terjadi interaksi

dan saling kenal-mengenal antara satu dengan lainnya di laut dan tempat-tempat lain disinggahinya terutama pelabuhan dan pasar/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di berbagai daerah. Saling kenal di antara mereka bukan hanya dalam hal nama, ciri fisik, dan gaya penampilan semata, melainkan juga pada pengenalan asal-usul daerah dan etnik hingga budaya lokal, terutama berupa tipe-tipe atau arsitektur kapal/perahu, alat tangkap, hingga bahasa yang dikomunikasikan antaranggota kelompok nelayan yang berbeda-beda etnik tersebut.

Kebanyakan nelayan penyelam Bugis-Makassar suka menceritakan pengalaman dan pengenalannya dengan komunitas nelayan Maluku dan Papua yang banyak dicirikan dengan aktivitas penangkapan ikan di lokasi-kolasi perairan karang yang disasi (dimiliki melalui hak kolektif desa dan tertutup bagi nelayan dari luar). Ceritanya, kebanyakan dari mereka juga menjadi petani-petani kecil yang mengandalkan pohon-pohon sagu, kelapa, mangga, nangka, dan aktivitas berburu dan meramu di hutan, terutama bagi orang Papua. Meskipun sebagian dari mereka sudah menjadi nelayan penuh yang beroperasi di perairan pesisir dan laut dalam untuk menangkap ikan-ikan dasar (*demersal fishes*) dan ikan-ikan permukaan (*pelagic fishes*), daerah penangkapan ikan pada umumnya tidak jauh dari pulau-pulau tempat pemukiman karena mereka bukan nelayan pengembara, seperti nelayan Bugis-Makassar, Buton, Bajo, dan lain-lain.

Nelayan penyelam Bugis-Makassar--sebagian besar melibatkan orang Bajo dalam kelompoknya--banyak mengenal budaya nelayan Bajo yang tersebar meluas di kawasan Timur Indonesia, terutama Sulawesi Tenggara, NTT, dan Halmahera (Maluku Utara). Nelayan Pulau Sembilan (Sinjai) menerangkan bahwa nelayan Bajo di mana-mana suka bermukim di pulau-pulau karang, berburu ikan dan biota liar (cumi-cumi, udang, dan kepiting), memungut teripang dan kerang-kerangan, dan meramu tumbuhan laut, seperti akar bahar, rotan laut, dan rumput laut di kawasan karang dengan berbagai tipe alat tangkap sederhana yang dibuat sendiri. Mereka bekerja dalam unit-unit keluarga inti atau individual dengan menggunakan perahu-perahu kecil bercadik (*jarangka*' dalam istilah Bajo).

Meskipun nelayan Bajo dikenal sebagai pengembara ulung di laut (*seanomaden*), menurut keterangan, mereka itu selalu memilih lokasi-lokasi perairan karang yang dangkal dan dekat dengan pulau.

Sama halnya nelayan *torani* (penangkap ikan terbang dan telur ikan) dari Galesong (Kabupaten Takalar) yang sering bertemu dengan kelompok-kelompok nelayan tongkol dari Buton di Laut Flores, dengan nelayan Ambon di beberapa daerah penangkapan ikan dalam wilayah Maluku, dan dengan kelompok-kelompok nelayan Buton, Ambon, dan Bugis-Makassar yang mengeksploitasi perairan Fak-Fak dan Biak-Papua (2015). Pengenalan terhadap para nelayan yang berbeda etnik terjadi terutama karena sering berbenturan pada daerah penangkapan ikan yang sama. Meskipun kelompok-kelompok nelayan pengembara tersebut sama-sama menggunakan kapal-kapal kayu besar, menurut cerita nelayan *torani* bahwa bentuk dan arsitektur perahunya terutama pada buritan dan haluan sedikit banyak mencerminkan asal etnik masing-masing.

Sementara itu, nelayan pancing tongkol dari Babana (Sinjai Timur) dan Lappa (Sinjai Utara) yang mengembara ke perairan Nusantara bagian selatan dan barat seringkali berinteraksi dengan para nelayan Sumba dan Sumbawa (NTB), Bali, Madura, dan Jawa di laut dan pelabuhan. Bahkan kebanyakan kelompok nelayan tongkol Bugis-Makassar bermitra dengan juragan nelayan Jawa yang berperan memasarkan tangkapan dan sumber perolehan pinjaman uang di daerah lain (Lampe, 2006, 2010, 2014). Demikianlah terjadi saling pengenalan budaya maritim terutama pada unsur-unsur bahasa, agama, tipe dan arsitektur kapal/perahu serta alat tangkap, hingga struktur kelompok kerja nelayan. Perahu/kapal penangkapan ikan nelayan Jawa dan Bali, menurut nelayan Bugis-Makassar, dicirikan dengan tipe-tipe *mayang* dan *jukung* dipenuhi ukiran dengan motif-motif binatang keramat berupa ular naga, macan, dan sebagainya. Alat tangkap ikan terutama *payang* (pukat kantong berukuran besar) dan pancing untuk menangkap ikan-ikan pelagis berkelompok terutama tongkol. Adapun struktur kelompok kerja nelayan dikenal dengan *Juragan-Pandega* yang *Juragan* adalah status pemilik usaha (alat-alat produksi) dan *Pandega* adalah anak buah/anggota. Tentu saja para nelayan setempat tersebut juga sedikit

banyak mengenal unsur-unsur budaya maritim nelayan Bugis-Makassar seperti itu. Pengenalan nelayan Bugis-Makassar terhadap budaya maritim komunitas-komunitas nelayan yang didatangi tersebut bahkan sampai pada ciri khas bentuk rumah, kuliner, musik dan lagu daerah, kerajinan tangan, dan lain-lain dimungkinkan mereka tinggal dan memperoleh kebutuhan hidup di sana selama tiga sampai empat bulan di musim barat sebelum kembali ke Sulawesi Selatan menjelang tibanya musim barat.

Pengalaman dan wawasan nelayan pengembara Bugis-Makassar tentang keanekaragaman etnik dan budaya maritim Nusantara ini dapat dibandingkan dengan yang diceritakan pelaut-pelaut Bugis-Makassar dari Bira (Bulukumba) dan Pelabuhan Paotere (Kota Makassar) yang daerah-daerah tujuannya adalah pelabuhan kota-kota pantai. Melalui transaksi dagang dengan para pelaku pasar dan konsumen dari berbagai asal daerah dan etnik berbeda-beda, mereka pun memiliki akumulasi pengetahuan dan wawasan keanekaragaman sosial budaya maritim di Nusantara ini (Lampe, 2012). Fenomena menarik ialah pelaut Buton dari Pulau Binongko yang memiliki kebiasaan mengabadikan pengalaman pelayarannya melalui pemberian nama pada anak-anak mereka di kampung halamannya yang diambil dari nama pulau-pulau atau kota-kota pantai terkenal di Nusantara yang pernah disinggahnya. Misalnya, *La Manggasa* (Makassar), *La Ambo* (Ambon), *La Bangka* (Bangka) untuk anak laki-laki, dan *Wa Manggasa*, *Wa Ambo*, *Wa Bangka* (Bangka) untuk anak perempuan (Hamid, 2011).

Kepelautan dan Wawasan Kesatuan Tanah Air dan Bangsa Maritim Nusantara

Akumulasi pengetahuan dan wawasan nelayan pengembara Bugis-Makassar tentang geo-bio-iklim/musim, status pemanfaatan sumber daya laut secara terbuka dan tertutup, dan keanekaragaman etnik dan budaya kelompok-kelompok nelayan di Nusantara ini pada gilirannya mereproduksi wawasan kesatuan tanah air, bahasa, dan bangsa Maritim Indonesia. Pengalaman pengembaraan ke perairan kawasan timur dan barat serta selatan Nusantara telah menumbuhkan wawasan akan karakteristik bentang laut dan gugusan pulau-pulau besar dan

kecil hingga wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga bagian timur dan selatan (kawasan Pasifik Timur dan Selatan, Samudra Hindia) dan barat (Malaysia, Samudra Hindia). Adapun karakteristik perairan dan wilayah perbatasan bagian utara Nusantara, nelayan Bugis-Makassar ketahui lewat interaksinya dengan kelompok-kelompok nelayan Bajo, Buton, Sangir Talaud (Sulawesi Utara), Ambon dan Ternate (Maluku) yang sejak dahulu beroperasi di situ. Patut diketahui bahwa nelayan dari beberapa etnik tersebut tergolong pelaut yang berani dan cukup ulet di Nusantara ini. Sering terjadinya kasus pencurian ikan oleh nelayan asing di wilayah perairan Nusantara--mereka itu dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara--yang diberi sanksi hukum oleh pemerintah Indonesia (akhir-akhir ini populer dengan peledakan dan penenggelaman kapal) telah memperkuat kesadaran nasionalisme nelayan Bugis-Makassar khususnya dan nelayan Indonesia pada umumnya. Sama halnya kasus-kasus penahanan nelayan Bugis-Makassar oleh Pemerintah Australia di masa lalu karena sering memasuki wilayah perairan negara itu telah menumbuhkan wawasan akan batas wilayah perairan di antara kedua negara tersebut, demikian halnya dengan Timur Leste, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak boleh lagi terulang.

Bagi nelayan pengembara Bugis-Makassar, wawasan budaya kesatuan tanah air dan bangsa maritim Indonesia juga tumbuh dari pandangan yang memahami laut Nusantara dan isinya sebagai *opened-closed acces*. Dari pengalamannya, mereka telah menyaksikan secara langsung kelompok-kelompok nelayan dari berbagai asal pulau dan etnik, termasuk mereka sendiri, secara bersama-sama mengeksplorasi daerah-daerah penangkapan ikan yang subur, dan mengetahui mereka ini semua adalah warga negara Indonesia sendiri, kecuali nelayan asing yang sering menyerobot dari luar melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Sama halnya zona-zona perairan tertutup (kebanyakan lokasi karang) dengan berbagai peruntukan (taman nasional, kawasan konservasi terumbu karang dan satwa liar, budi daya laut, pariwisata laut, wilayah adat), semuanya dipahami dalam konteks kebijakan nasional dan norma adat setempat.

Wawasan kesatuan tanah air dan bangsa maritim dari nelayan Bugis-Makassar mewujudkan pula dalam pemahaman dan penggunaan aneka warna simbol nasional terutama bahasa Indonesia, bendera kebangsaan, kepatuhan pada peraturan nasional. Mereka sadar sepenuhnya akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai media pergaulan atau transaksi di antara kelompok-kelompok nelayan dan dengan pihak-pihak lainnya dari beragam etnis di negara kepulauan ini. Itulah sebabnya semua pelaut di Indonesia, termasuk nelayan Bugis-Makassar, sejak awal berusaha keras mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Wawancara saya berkali-kali dengan beberapa nelayan Bugis-Makassar, Bajo, Buton, Madura, (Lampe, 2012), Ternate, Halmahera (Tang dan Lampe, 2005), dan Mandar (Lampe, 2014) membuktikan kemahiran mereka menggunakan bahasa Indonesia melebihi orang-orang dari komunitas-komunitas petani, peternak, dan para pedagang yang hidup di darat.

Simbol kebangsaan berupa Bendera Merah Putih sangat nyata dalam kehidupan kepelautan para nelayan pengembara dan pelayar Indonesia sehari-hari dalam ruang perairan Nusantara ini. Dari penyaksiannya, nelayan pengembara Bugis-Makassar mengakui bahwa setiap kapal nelayan atau pelayar milik rakyat dari berbagai asal dan etnik, demikian halnya milik pemerintah atau perusahaan swasta dicirikan dengan pemasangan bendera nasional. Hal ini dapat dibandingkan dengan semua kantor atau lembaga formal (instansi) Indonesia di darat yang mengibarkan bendera nasional setiap hari atau pada hari-hari raya saja. Pengibaran bendera nasional di kapal-kapal penangkapan ikan, menurut keterangan nelayan, bukan hanya dimaksudkan agar dapat dikenali oleh Marinir atau Satgas Keamanan Laut dan warga negara Indonesia lainnya untuk dibedakan dari kapal-kapal asing, terutama yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal, tetapi sebenarnya sekaligus merupakan indikasi jiwa nasionalisme (pengakuan kebangsaan dan cinta tanah air) dari para nelayan sendiri.

Wawasan sosial-budaya maritim nelayan terwujud pula dalam sikap kepatuhan pada peraturan nasional tingkat daerah provinsi dan pusat, terutama peraturan tentang kewajiban memiliki dokumen persyaratan melakukan pelayaran dan penangkapan ikan. Sebagai contoh,

di tahun 2014 seorang nakoda kapal tongkol (*Juragan/Pinggawa Laut*) dari Lappa (Sinjai Utara) menunjukkan kepada saya berkas dokumen persyaratan pelayaran lintas provinsi antara lain Surat Kepemilikan Kapal, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, Surat Penangkapan Ikan (SPI) di daerah tertentu, dan Surat Kartu Andon (SKA). Karena kepatuhan normatif, menurut keterangan dari nakoda tersebut, sehingga dokumen administratif pelayarannya selalu lengkap dan belum pernah mengalami kasus penahanan kapal (dengan awaknya) di daerah-daerah provinsi lain. Meskipun berlakunya peraturan baru sejak awal periode 2000-an yang menetapkan setiap izin operasional hanya berlaku pada satu daerah operasional saja--di masa sebelumnya satu izin pelayaran dan penangkapan ikan bisa berlaku pada beberapa daerah provinsi--yang otomatis membatasi ruang gerak dan produktivitas usaha nelayan, namun sikap kepatuhan normatif nelayan sejak dahulu tetap bertahan.

Tumbuhnya wawasan kesatuan geo-bio-sosial-budaya nelayan Indonesia, khususnya nelayan pengembara Bugis-Makassar, dari Sulawesi Selatan dalam beberapa aspek bisa dibandingkan dengan wawasan global yang dimiliki dan dipraktikkan oleh kelompok-kelompok nelayan Eropa Barat yang tergabung dalam Perhimpunan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang beroperasi bersama di Laut Utara dan Laut Atlantik. Mereka memiliki wawasan kesatuan wilayah laut bebas tersebut, saling kenal (lewat pemasangan bendera nasional masing-masing) dan pengakuan akan kesamaan hak pemanfaatan atas wilayah perairan Laut Utara, dan tanggung jawab bersama dalam pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan dan lestari tanpa terjadinya konflik di antara mereka (Lampe, 1986).

Kesimpulan

Ketika berbicara tentang pengembangan kebudayaan maritim dan menjaga keutuhan integrasi bangsa dan harmonisasi sosial di negara kepulauan besar seperti Indonesia, subjek studi pada pelaut (pelayar dan nelayan pengembara) dengan fokus pada aspek-aspek pelayaran dan interaksi kemaritiman menjadi sangat penting dan

mendesak dilakukan. Hal demikian karena inti (*core*) dan karakteristik umum budaya maritim sebetulnya melekat pada aspek-aspek pelayaran dan interaksi kemaritiman sebagai perangkat kasar (*hardware*) dan wawasan/konsepsi geo-bio-sosial-budaya maritim sebagai perangkat lunak (*software*). Dari perspektif ekosistem dengan model analisis yang dikembangkan dalam studi antropologi maritim di Indonesia sekarang, perangkat lunak kebudayaan maritim yang mencakup wawasan/konsepsi kesatuan geo-bio-sosial-budaya maritim nasional dipahami sebagai reproduksi atau fungsi dari pengalaman pelayaran dan interaksi kemaritiman para pelaut dari berbagai asal daerah dan kelompok etnik. Dengan belajar pada kasus kelompok-kelompok nelayan pengembara Bugis-Makassar dengan aplikasi model analisis tersebut, teridentifikasi empat tema wawasan kesatuan geo-bio-sosial-budaya maritim nelayan, yakni (1) wawasan geo-bio-iklim perairan, (2) wawasan tentang laut sebagai ruang dan akses terbuka dan tertutup, (3) wawasan diversitas etnik dan budaya maritim, dan (4) wawasan kesatuan Tanah Air dan Bangsa Maritim Nusantara. Dalam rangka pembangunan peradaban maritim Indonesia, memperkuat integrasi bangsa dan harmonisasi sosial di negara kepulauan besar multietnik dan budaya ini, pengembangan wawasan geo-bio-sosial-budaya maritim Nusantara bagi semua kategori dan level warga masyarakat maritim sebagai basisnya semestinya digalakkan melalui pendidikan formal maupun nonformal secara intensif dan merata ke depan.

Daftar Pustaka

- Benardie S.P., H. (2003). *Sejarah Maritim Indonesia*. Jakarta Pusat: Dewan Maritim Indonesia.
- BPPT Teknologi–WANHANKAMNAS. (1996). *Benua Maritim Indonesia*. Jakarta: Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam.
- Curtin, P.D. (1984). *Cross-Cultural Trade in World History*. London, New York: Cambridge University Press.
- Dick-Read, R. (2005). *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*. Judul Asli “The Pantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times, dialihbahasakan oleh Edrijani Azwakdi. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Hage, H. ten. (1910). *De zeevisscherij in Nederlandsch-Indië. Tijdschrift voor Economische Geographie, 1*.
- Hak, Durk. (1984). ‘Dr.A.H.J.Prins As A Maritime Anthropologist’. Dalam *Watching the Seaside: Essays on Maritime Anthropology* (hlm. 1-9). Groningen: Universiteit te Gronigen-Nederland.
- Hamid, A.R. (2011). *Orang Buton Suku Bangsa Bahari*. Yogyakarta : Ombak.
- Horridge, A. (1981). *The prahu; Traditional sailing boat of Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Lampe, M. (1986). “*Relatie tusschen visscherij economie, verwantschap, en religie van Urk Visschersamenleving–Nederland*”. Penelitian lapangan dalam rangka program studi Magister Culturele Antropologie Rijksuniversiteit di Leiden Nederland.
- _____, (1989). Strategi-strategi Adaptif yang Digunakan Nelayan Madura dalam Kehidupan Ekonomi Perikanan Lautnya. Tesis S2 Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia-Instituut Culturele Antropologie Rijksuniversiteit te Leiden Nedeland.
- _____, (2006). Pemanfaatan Sumberdaya Taka: Perilaku Nelayan dan Konsekuensinya dalam Konteks Sosial Budaya Internal dan Eksternal (Disertasi S3), Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- _____, (2010). Penganekaragaman dan penyeragaman dalam dinamika usaha penangkapan ikan kawasan terumbu karang: Sebuah penjelasan prosesual dan kontekstual”. *Jurnal Antropology Indonesia 1*, 58-73.
- _____, (2012). Bugis-Makassar seamanship and reproduction of maritime cultural values in Indonesia. *Jurnal Humaniora, 24* (2), 121-132.
- _____, (2015). *Pinggawa-Sawi Nelayan Bugis-Makassar dalam Analisis Relasi*

- Internal dan Eksternal. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17 (1), 77-87.
- Lampe, M. (1996/1997) dan (1997/1998). Studi Analisis Sosial dalam Rangka COREMAP Sulawesi Selatan. Penelitian kerjasama LIPI-LP2M Unhas.
- _____, (2010). Menggali Kelembagaan Lokal dan Wawasan Budaya Bahari yang Menunjang Bagi Penguatan Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial di Indonesia. Penelitian Hibah Stranas Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Makassar.
- _____, (2014). Potensi Perikanan Laut yang menunjang bagi Pembangunan Perikanan Laut Sulawesi Barat yang Produktif, Berkelanjutan, berkeadilan, dan Arif Lingkungan ke Depan. Penelitian dibiayai Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.
- _____, (2014/2015). Analisis Struktural Dekonstruksional Kelompok dan Fenomena Kemiskinan Nelayan Bugis-Makassar. Penelitian dibiayai LP2M Unhas.
- Macknight, C.C. (1969). *The Macassans: A Study of the Early Trepang Industry along the Northern Territory Coast*. Ph.D Thesis, Canberra: ANU.
- _____, (1976). *The Poyage to Marege: Macassan Trepangers in Northern Australia*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Nishimura, A. (1973). *A Preliminary Report on Current Trends in Marine Anthropology*. Occasional Papers of The Centre Of Marine Ethnology. No. 01. Japan.
- Paeni, M. (1985). "Memahami Kebudayaan Maritim Bugis-Makassar. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Budaya Maritim, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar.
- Poelinggomang, E.L. (2002). *Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Poggie, J.J. & Pollnac, R.B. (1988). Danger and rituals of avoidance among New England fishermen. *Maritime Anthropological Studies*, 1 (1), 66-78.
- Prins, A.H.K. (1965). *Sailing from Lamu: A Study of Maritime Culture in Islamic East Africa*. Assen: Van Gorcum.
- _____, (1984). *Watching the Sea Side: Essays on Maritime Anthropology*. Festschrift on the Occasion of His retirement from the Chair of Anthropology University of Groningen-Nederland. Groningen: Universiteit te Gronigen-Nederland (Durk Hak dan Ybeltje Krues (Eds)).
- Satria, A. (2014). Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. Disajikan dalam acara Temu Tokoh Nasional FPIK Unpad, Bandung.
- Sutherland, H. (2000). Trepang and wangkang: The China trade of eighteenth century Makassar c. 1720s-1840s. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 156 (3), 451-472.
- Tang, M. & Lampe, M. (2005). Bentuk-bentuk Sekuritas Sosial Masyarakat Nelayan Kawasan Perkotaan Parepare, Baubau, dan Ternate. Proyek Penelitian dibiayai Departemen Sosial.

